

Desentralisasi dalam Pendanaan Pendidikan: Kelebihan dan Kekurangan Pengalihan Kewenangan kepada Masyarakat Lokal

Shaimaa Abdelmonem Ahmed Abdelmaksoud

Program: Magister Manajemen Pendidikan Islam - UIN Madura
Email Korespondensi: Shimaaahmed49@yahoo.com

ABSTRACT

This paper examines the decentralization of education funding, focusing on the benefits and challenges of shifting financial management authority from central governments to local communities. It begins by defining key concepts, including education financial management and decentralization in education, followed by a comparative analysis of centralized vs. decentralized systems. A case study of Indonesia's Bantuan Operasional Sekolah (BOS) program illustrates how decentralized funding operates in practice, highlighting its successes (e.g., increased enrollment, local flexibility) and shortcomings (e.g., inequitable distribution, corruption risks). The study further explores the broader pros and cons of decentralization, such as improved efficiency and community empowerment versus potential disparities and quality control issues. Finally, it proposes a hybrid model, combining decentralized execution with centralized quality standards and equity safeguards, emphasizing technology-driven monitoring for transparency.

Keywords: Education financing, decentralization, BOS program, Indonesia, local governance.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis desentralisasi pendanaan pendidikan, khususnya kelebihan dan tantangan dalam pengalihan wewenang pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat ke komunitas lokal. Kajian diawali dengan definisi konsep kunci seperti manajemen keuangan pendidikan dan desentralisasi pendidikan, dilanjutkan dengan analisis perbandingan sistem terpusat versus desentralisasi. Studi kasus program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Indonesia menjadi contoh implementasi pendanaan desentralisasi, menunjukkan keberhasilan (misalnya peningkatan angka partisipasi sekolah, fleksibilitas lokal) sekaligus kelemahannya (seperti ketimpangan distribusi dan risiko korupsi). Penelitian ini juga mengkaji kelebihan dan kekurangan desentralisasi secara umum, termasuk efisiensi yang lebih baik dan pemberdayaan masyarakat versus potensi kesenjangan dan masalah pengendalian mutu. Sebagai solusi, artikel mengusulkan model hibrida yang menggabungkan pelaksanaan desentralisasi dengan standar kualitas terpusat dan mekanisme pemerataan, dengan penekanan pada pemantauan berbasis teknologi untuk transparansi.

Kata Kunci: Pendanaan pendidikan, desentralisasi, program BOS, Indonesia, tata kelola lokal.

Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, konsep desentralisasi dalam sektor pendidikan telah menjadi perhatian utama para pembuat kebijakan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Transformasi sistem pengelolaan pendidikan dari model terpusat menuju pendekatan berbasis lokal ini didorong oleh keyakinan bahwa otoritas daerah dan institusi pendidikan setempat memiliki pemahaman lebih baik tentang kebutuhan spesifik masyarakat mereka.

Di Indonesia, implementasi desentralisasi pendidikan mencapai momentum penting dengan diperkenalkannya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun 2005. Kebijakan ini merepresentasikan perubahan paradigma dalam pengelolaan dana pendidikan, di mana sekolah diberikan wewenang lebih besar dalam mengalokasikan sumber daya sesuai prioritas lokal. Namun demikian, praktik desentralisasi ini tidak lepas dari berbagai tantangan kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dampak desentralisasi pendanaan terhadap efektivitas penyelenggaraan pendidikan
2. Mengevaluasi keberhasilan program BOS sebagai model desentralisasi di Indonesia
3. Mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang mempengaruhi kinerja sistem pendanaan berbasis sekolah

Metodologi penelitian mencakup analisis dokumen kebijakan, studi literatur, dan tinjauan terhadap data implementasi program BOS dari berbagai sumber terpercaya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga bagi pengembangan model pengelolaan dana pendidikan yang lebih efektif di masa depan.

Konteks penelitian menjadi semakin relevan mengingat komitmen pemerintah Indonesia untuk mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya pada tujuan ke-4 tentang pendidikan berkualitas. Pemahaman mendalam tentang dinamika desentralisasi pendanaan pendidikan menjadi krusial untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam konteks keragaman geografis dan sosial Indonesia.

Pengertian Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan merupakan komponen vital dalam sistem pendidikan yang mencakup kemampuan mengelola dan mengalokasikan dana secara optimal. Proses ini tidak sekadar melibatkan identifikasi sumber pendanaan, tetapi juga memastikan penggunaan dana yang tepat guna untuk mendukung berbagai aktivitas pendidikan.

Sebagai investasi strategis, pembiayaan pendidikan memerlukan kontribusi signifikan baik dari anggaran pemerintah maupun partisipasi masyarakat. Pengelolaan dana yang efektif dan efisien menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan pendidikan.

Hal ini tercermin dalam praktik manajemen keuangan pendidikan yang meliputi tiga aspek fundamental:

1. Penerimaan dana dari berbagai sumber.
2. Pengalokasian anggaran sesuai prioritas kebutuhan.
3. Pertanggungjawaban keuangan yang transparan.

Pendekatan sistematis dalam pembiayaan pendidikan ini bertujuan untuk:

- Memastikan ketersediaan dana yang memadai.
- Mengoptimalkan penggunaan sumber daya.
- Mendorong akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pendidikan,
- Mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang berkualitas. (Prof. Dedy Mulyasana, 2022)

Manajemen Keuangan Pendidikan

Manajemen Keuangan Pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi sumber daya keuangan di lembaga pendidikan untuk memastikan tercapainya tujuan pendidikan secara efisien dan efektif.

Desentralisasi dalam Manajemen Pendidikan

Desentralisasi didefinisikan sebagai sistem manajemen yang memberikan kewenangan kepada unit-unit lokal untuk mengarahkan program dan kegiatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat. Konsep ini melibatkan distribusi wewenang antar berbagai tingkat administrasi, dengan memperkuat peran masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Dalam konteks pendidikan, desentralisasi berarti pengalihan kewenangan pengambilan keputusan dari tingkat pusat ke dinas dan sekolah lokal, dengan fokus pada:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat yang efektif.
2. Mengaktifkan peran keluarga dan organisasi sipil.
3. Memberdayakan dinas pendidikan daerah.
4. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Mekanisme ini bertujuan untuk:

- Meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
- Meningkatkan efisiensi manajemen sekolah.
- Menangani masalah lokal secara langsung.
- Berkontribusi pada pengembangan masyarakat. (Khalaf Ragab Hafez Abdul Rasul, 2018)

Perbandingan Sentralisasi dan Desentralisasi dalam Pendidikan

1. Konsep Dasar

Menurut McGinn & Welsh (1999), desentralisasi didefinisikan sebagai transfer kewenangan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Proses ini dapat berupa:

- **Dekonsentrasi:** Pelimpahan wewenang ke unit administratif dalam struktur kementerian pendidikan (misalnya dinas daerah).
- **Devolusi:** Pengalihan kewenangan ke badan otonom atau masyarakat lokal.

2. Alasan Penerapan Desentralisasi

- Meningkatkan efisiensi pemerintahan dan akuntabilitas.
- Mengurangi sentralisasi kekuasaan.
- Di negara berkembang, bertujuan untuk memobilisasi sumber daya lokal melalui pajak daerah dan partisipasi masyarakat

3. Kelebihan dan Kekurangan

A. Sistem sentralisasi

Sistem Sentralisasi dalam pendidikan memiliki sejumlah kelebihan yang patut dicatat. Pertama, sistem ini menjamin adanya keseragaman kurikulum dan standar pendidikan secara nasional, sehingga setiap siswa di seluruh wilayah negara memperoleh hak belajar dengan kualitas yang relatif setara. Kedua, sentralisasi mendukung terciptanya kesetaraan kesempatan pendidikan melalui pengaturan distribusi sumber daya yang terpusat. Ketiga, dari sisi efisiensi, sistem ini mampu menekan biaya melalui penerapan skala ekonomi, terutama dalam pengadaan buku, pelatihan guru, atau pembangunan infrastruktur pendidikan. Selain itu, pendekatan terpusat juga memperkuat kohesi dan koordinasi antar pemangku kepentingan di sektor pendidikan, mulai dari pemerintah pusat hingga satuan pendidikan di daerah.

Namun demikian, sistem sentralisasi juga memiliki beberapa kekurangan mendasar. Salah satunya adalah terbatasnya ruang bagi inisiatif dan inovasi lokal karena keputusan-keputusan strategis ditentukan oleh otoritas pusat. Hal ini menyebabkan kurangnya fleksibilitas dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi spesifik daerah. Sistem ini juga dinilai kurang responsif terhadap kebutuhan lokal yang beragam, seperti perbedaan geografis, sosial budaya, maupun kapasitas sumber daya. Selain itu, birokrasi yang panjang dan hierarkis dalam sistem terpusat sering kali menghambat kecepatan pengambilan keputusan, sehingga efektivitas pelaksanaan program pendidikan di lapangan bisa terganggu.

B. Sistem Desentralisasi

Sistem desentralisasi dalam pendidikan menawarkan berbagai keunggulan yang mendukung terciptanya tata kelola pendidikan yang lebih demokratis dan adaptif.

Salah satu kelebihanannya adalah mendorong demokratisasi pendidikan, di mana pengambilan keputusan tidak lagi dimonopoli oleh pemerintah pusat, melainkan melibatkan aktor-aktor lokal seperti dinas pendidikan daerah, sekolah, dan masyarakat. Hal ini memberikan ruang bagi partisipasi yang lebih luas dari komunitas dalam menentukan arah dan prioritas pendidikan di wilayahnya.

Selain itu, sistem ini bersifat fleksibel terhadap inovasi lokal. Sekolah dan pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk menyesuaikan program pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat, sehingga proses pendidikan menjadi lebih relevan dan kontekstual. Desentralisasi juga berpotensi meningkatkan partisipasi masyarakat, baik dalam bentuk pengawasan, dukungan moral, maupun kontribusi sumber daya. Keikutsertaan masyarakat menciptakan rasa memiliki terhadap institusi pendidikan, yang berdampak positif pada keberlanjutan program. Di samping itu, kompetisi sehat antar sekolah dalam sistem yang desentralistik dapat menjadi pemicu bagi peningkatan mutu pendidikan, karena setiap sekolah berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi peserta didiknya.

Namun, sistem desentralisasi juga tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu kekhawatiran utama adalah meningkatnya risiko ketimpangan antar daerah. Wilayah dengan kapasitas sumber daya manusia dan keuangan yang kuat cenderung lebih mampu mengelola pendidikan secara efektif dibandingkan daerah yang tertinggal. Di sisi lain, adanya otonomi yang besar di tingkat lokal membuka celah bagi potensi penyalahgunaan wewenang, terutama bila mekanisme pengawasan tidak berjalan secara optimal. Tantangan lain yang signifikan adalah kesulitan dalam memastikan koordinasi antara kebijakan nasional dan pelaksanaannya di daerah. Perbedaan visi dan kapasitas antar wilayah bisa mengakibatkan ketidaksinambungan dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional secara keseluruhan (Rashid Khaled Rashad Mansur, 2004)

PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI INDONESIA

1. Pengertian BOS

BOS merupakan program pemerintah untuk menyediakan pendanaan biaya operasional non-personalia bagi satuan pendidikan dasar dalam rangka pelaksanaan wajib belajar 9 tahun. Program ini bertujuan:

- Meningkatkan akses pendidikan bermutu.
- Mencegah putus sekolah akibat kesulitan finansial.
- Menjamin kelanjutan pendidikan dari SD ke SMP.

Prinsip Penting:

- Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana.
- Sumbangan sukarela orang tua tidak boleh dipaksakan.

2. Tujuan BOS

Umum:

- Meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pendidikan wajib belajar 9 tahun.
- Mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Khusus:

- Menghapus pungutan biaya operasional bagi semua siswa SD/SMP negeri.
- Membebaskan siswa miskin dari segala pungutan di sekolah negeri/swasta.
- Meringankan biaya operasional sekolah swasta.

3. Sasaran & Besaran Dana (2024)

Penerima:

- Seluruh SD/SDLB dan SMP/SMPLB/Satap negeri/swasta yang terdaftar di Dapodikdasmen.
- Sekolah swasta harus memiliki izin operasional.

Besaran per Siswa/Tahun:

- SD/SDLB: Rp 900.000
- SMP/SMPLB/Satap: Rp 1.100.000

4. Penggunaan Dana BOS

Prioritas Utama:

- Pengembangan perpustakaan.
- Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru.
- Pembelajaran dan ekstrakurikuler.
- Perawatan fasilitas sekolah.
- Honor guru/tenaga honorer.

Larangan Penggunaan:

- Investasi atau pinjaman.
- Rehabilitasi berat/pembangunan gedung.
- Studi banding/karya wisata.
- Pembelian LKS tidak relevan.

5. Mekanisme Pengelolaan

- Dana diterima utuh tanpa pemotongan.
- Pengambilan oleh bendahara sekolah dengan persetujuan kepala sekolah.

- Penggunaan sesuai Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
- Pelaporan melalui Sistem Informasi BOS (SIBOS).

6. Peran Pemangku Kepentingan

- **Sekolah:** Wajib mengidentifikasi anak putus sekolah.
- **Pemerintah Daerah:** Mengawasi pungutan liar.
- **Masyarakat:** Dapat melapor jika menemukan penyimpangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan dan analisis dokumen kebijakan. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi desentralisasi dalam pembiayaan pendidikan di Indonesia, khususnya melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif karena berfokus pada analisis konteks, kebijakan, serta interpretasi makna yang terkandung dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis dan faktual berdasarkan data dan literatur yang tersedia.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- Data primer sekunder berupa dokumen resmi pemerintah seperti:
 - Petunjuk Teknis BOS tahun 2024,
 - Peraturan Menteri Pendidikan terkait pembiayaan pendidikan,
 - Dokumen perencanaan dan evaluasi BOS dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Literatur ilmiah dan buku akademik, seperti karya McGinn & Welsh (1999), serta artikel yang membahas desentralisasi pendidikan dan manajemen pembiayaan.
- Data statistik dan laporan evaluasi yang diperoleh dari situs resmi seperti Kemendikbud.go.id, BPS, dan sumber terpercaya lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui:

- Studi literatur terhadap jurnal, buku, dan laporan hasil penelitian terkait topik desentralisasi pendidikan dan pendanaan sekolah.
- Kajian terhadap kebijakan publik yang relevan dengan implementasi BOS.

- Tinjauan terhadap laporan pelaksanaan dan evaluasi program BOS dari berbagai provinsi sebagai studi komparatif.

4. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan analisis isi terhadap dokumen dan data yang terkumpul. Peneliti mengidentifikasi pola, tema, serta hubungan antar variabel seperti:

- Efektivitas pengelolaan dana BOS di tingkat sekolah,
- Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan,
- Kesesuaian penggunaan dana dengan tujuan program BOS,
- Tantangan dan faktor penghambat dalam pelaksanaan desentralisasi pendanaan.

Langkah-langkah analisis meliputi:

1. Reduksi data: menyaring informasi yang relevan.
2. Penyajian data: mengelompokkan dalam tema utama (misalnya: transparansi, efektivitas, partisipasi).
3. Penarikan kesimpulan: menyusun interpretasi berdasarkan temuan dan membandingkan dengan teori dan kebijakan yang berlaku.

Hasil dan Pembahasan

1. Dampak Desentralisasi Pendanaan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan

Hasil analisis menunjukkan bahwa desentralisasi pendanaan melalui program BOS telah membawa perubahan signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah. Sekolah memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menyusun dan merealisasikan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal.

Namun, efektivitas desentralisasi ini masih dipengaruhi oleh kapasitas manajemen sekolah yang beragam. Sekolah-sekolah di daerah perkotaan cenderung lebih siap dalam mengelola dana secara transparan dan akuntabel, sedangkan sekolah di daerah tertinggal menghadapi kendala seperti keterbatasan SDM, minimnya pelatihan pengelolaan keuangan, dan lemahnya pengawasan.

Desentralisasi pendanaan juga berkontribusi pada peningkatan partisipasi masyarakat melalui komite sekolah. Namun, dalam praktiknya, partisipasi ini masih sering bersifat simbolis, terutama di sekolah-sekolah dengan budaya partisipatif yang belum berkembang.

2. Evaluasi Program BOS sebagai Model Desentralisasi

Program BOS menjadi salah satu kebijakan strategis dalam konteks desentralisasi pendidikan. Berdasarkan dokumen evaluasi dan laporan pelaksanaan, BOS berhasil membantu mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan akses pendidikan, khususnya bagi siswa dari keluarga tidak mampu.

Keunggulan utama dari program BOS antara lain:

- Pendistribusian dana langsung ke rekening sekolah tanpa perantara,
- Proses perencanaan berbasis sekolah (school-based management),
- Mekanisme pelaporan melalui Sistem Informasi BOS (SIBOS) yang lebih transparan.

Namun, program ini juga menghadapi sejumlah permasalahan, seperti:

- Ketidaktepatan waktu pencairan dana,
- Ketergantungan yang tinggi terhadap dana BOS tanpa adanya diversifikasi sumber pendanaan lain,
- Risiko penyelewengan dana di tingkat lokal karena lemahnya pengawasan.

Beberapa sekolah juga masih belum optimal dalam menyusun RKAS yang sesuai dengan kebutuhan nyata, sehingga dana BOS belum sepenuhnya mendukung peningkatan mutu pembelajaran.

Faktor-Faktor yang Perlu Dipertimbangkan dalam Implementasi Desentralisasi

Dalam menentukan kebijakan sentralisasi atau desentralisasi suatu aktivitas, beberapa aspek kritis terkait struktur organisasi dan lingkungan operasional harus dianalisis secara komprehensif:

Aktivitas yang memerlukan aliran informasi cepat, seperti manajemen krisis dan layanan darurat, lebih cocok menggunakan model sentralisasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan konsistensi instruksi, kecepatan respons, serta akuntabilitas yang terpusat.

Sementara itu, aktivitas dengan kebutuhan koordinasi yang terbatas dapat didesentralisasikan. Dalam menentukan kebijakan apakah suatu aktivitas lebih cocok menggunakan sentralisasi atau desentralisasi, ada beberapa aspek kritis yang harus dianalisis secara komprehensif, terkait dengan struktur organisasi dan lingkungan operasional.

- Pertama, jenis aktivitas organisasional perlu diperhatikan. Untuk aktivitas yang bersifat rutin atau mekanis dan memerlukan tingkat spesialisasi rendah, pendekatan sentralisasi lebih feasible karena aktivitas tersebut dapat diawasi oleh supervisor umum tanpa memerlukan keahlian khusus. Sebaliknya, aktivitas yang

membutuhkan keahlian teknis tinggi, seperti penelitian dan pengembangan (R&D) atau analisis kebijakan, memerlukan desentralisasi dengan pengawasan oleh tenaga terlatih di level operasional.

- Kedua, faktor dispersi geografis juga penting. Organisasi dengan produksi multi-lokasi atau unit kerja yang tersebar secara geografis membutuhkan desentralisasi agar efisiensi pengawasan, responsivitas terhadap kebutuhan lokal, serta pengambilan keputusan secara real-time dapat tercapai. Contohnya adalah jaringan sekolah di daerah terpencil yang memerlukan otoritas pengelolaan mandiri.
- Ketiga, intensitas koordinasi antar-departemen menjadi faktor penentu lainnya. Aktivitas yang memerlukan aliran informasi cepat, seperti manajemen krisis dan layanan darurat, lebih cocok menggunakan model sentralisasi untuk memastikan konsistensi instruksi, kecepatan respons, dan akuntabilitas terpusat. Sebaliknya, aktivitas dengan kebutuhan koordinasi yang terbatas dapat didesentralisasikan. (Rashmi Karan, 2023)

Kaitannya dengan Tujuan SDGs

1. Implementasi desentralisasi pendanaan pendidikan melalui BOS memiliki kontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-4 tentang pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Namun, masih diperlukan upaya konsolidasi dan peningkatan tata kelola agar program ini dapat menjangkau kelompok marginal secara lebih adil dan efektif.

Kesimpulan

Implementasi desentralisasi dalam pembiayaan pendidikan, khususnya melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), telah membawa dampak signifikan terhadap peningkatan fleksibilitas dan otonomi sekolah dalam mengelola dana pendidikan sesuai kebutuhan lokal. Model ini mendorong penerapan manajemen berbasis sekolah, memperkuat peran komite sekolah, dan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Secara umum, program BOS berhasil mendukung akses pendidikan yang lebih merata, mengurangi angka putus sekolah, serta memberikan bantuan nyata bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Pendistribusian dana langsung ke sekolah dan sistem pelaporan berbasis teknologi menjadi indikator positif dalam upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

Namun, efektivitas desentralisasi ini masih menghadapi tantangan, seperti kesenjangan kapasitas manajerial antar sekolah, ketidaktepatan waktu pencairan dana, dan lemahnya pengawasan di beberapa daerah. Masih terdapat sekolah yang belum optimal dalam merancang RKAS secara strategis, serta partisipasi masyarakat yang belum sepenuhnya aktif dan substansial.

Oleh karena itu, untuk memaksimalkan dampak positif desentralisasi pendanaan pendidikan, diperlukan:

- Peningkatan kapasitas manajemen keuangan di sekolah, terutama di daerah tertinggal.

- Penguatan sistem pengawasan dan transparansi, baik melalui teknologi maupun partisipasi masyarakat.
- Diversifikasi sumber pendanaan pendidikan, agar sekolah tidak terlalu bergantung pada dana BOS.
- Konsolidasi kebijakan pusat dan daerah dalam kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pendidikan inklusif dan berkualitas.

Dengan pendekatan yang tepat dan berkelanjutan, desentralisasi pendanaan melalui BOS berpotensi menjadi fondasi kuat bagi tercapainya sistem pendidikan yang adil, responsif, dan bermutu di seluruh wilayah Indonesia.

Daftar Pustaka

Nurheada. *Pengaruh Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa SMP Negeri 2 Pinrang*. Universitas Muhammadiyah Makassar. 2017.

Rashid Khalid Rashid' Mansour, "المركزية واللامركزية في الإدارة التربوية في فلسطين من وجهة نظر مديري ومديرات المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الفلسطينية", 2004, 61-57.

Khalaf Ragab Hafez' Abdelrasoul, "واقع دور الإدارة المدرسية في تفعيل المشاركة المجتمعية بالحلقة الثانية" JFUST, 2018, 6-7.

Dedy, Mulyasana, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Prinsip Tata Kelola Biaya Pendidikan*, 1 ed., 2022.

Rashmi 'Karan, "What is Decentralization?," 2023.